

Imbaljasa Lingkungan dan Penghitungan Karbon, serta Kegiatan lainnya sebagai salah satu Upaya dalam Mengatasi Perubahan Iklim di KPHP Kerinci

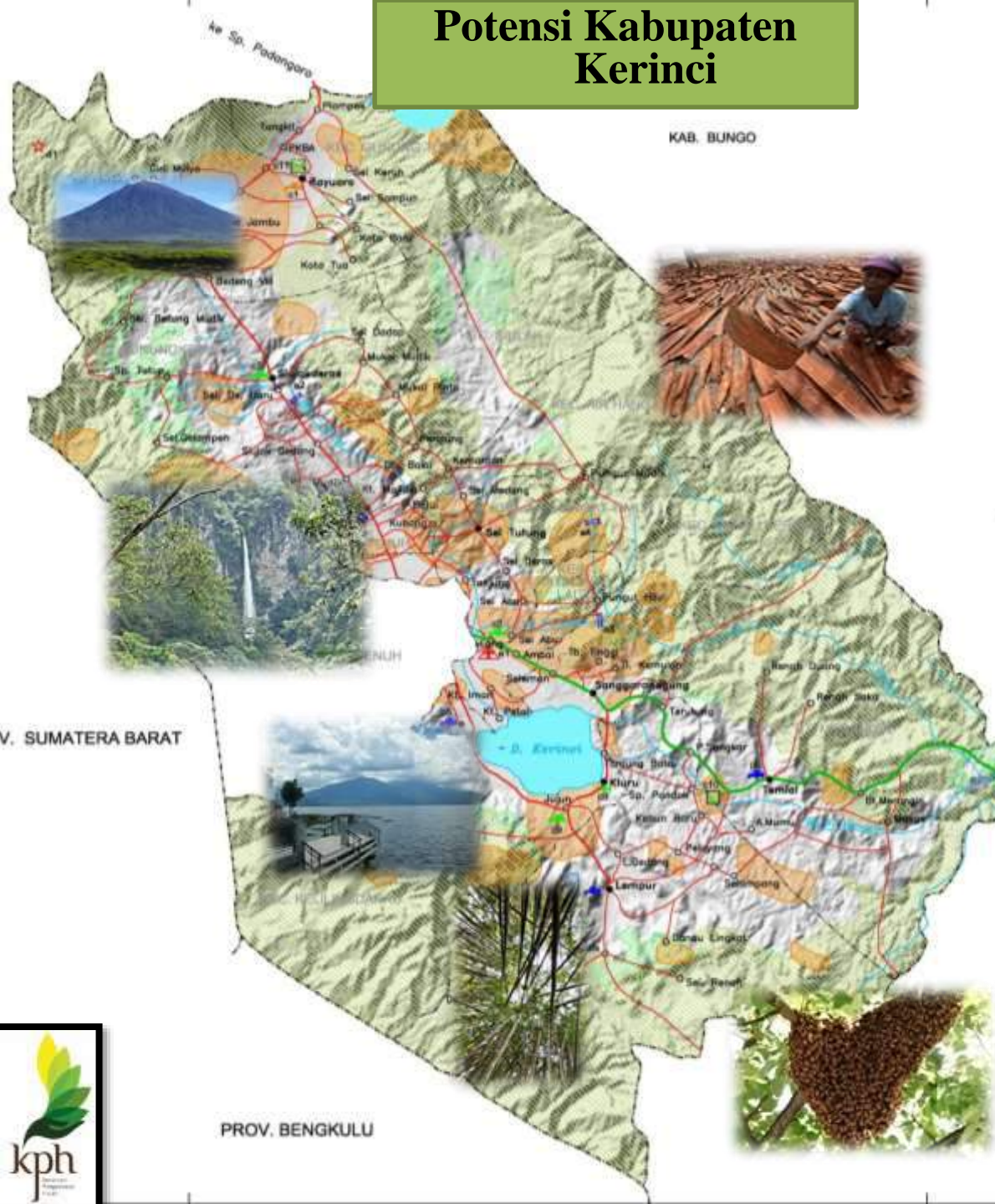
**Oleh: Neneng Susanti, S.Hut, M.Si
Plt. Kepala KPHP Kerinci Unit I
Propinsi Jambi**



A. Gambaran umum Kawasan Pengelolaan

Kondisi Hutan Produksi di Kabupaten Kerinci $\pm 70\%$ sudah ditempati masyarakat untuk kegiatan perkebunan dan pertanian., maka status hutan produksi di Kabupaten Kerinci lebih dikenal dengan Hutan Produksi Pola Partisipasi Masyarakat (HP3M). Melalui SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.960/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 menetapkan KPHP Kerinci (Unit I) menjadi KPHP Model dengan luas ± 34.250 hektar.

Potensi Kabupaten Kerinci



V. SUMATERA BARAT

PROV. BENGKULU





Potensi Jasa lingkungan

AIR TERJUN PANCARO RAYO



Negri Diawan



GOA KASAH



Permasalahan Kehutanan Kabupaten Kerinci

Ekonomi Masyarakat



Kebijakan Pemerintah



TEKANAN !!



Kawasan Hutan

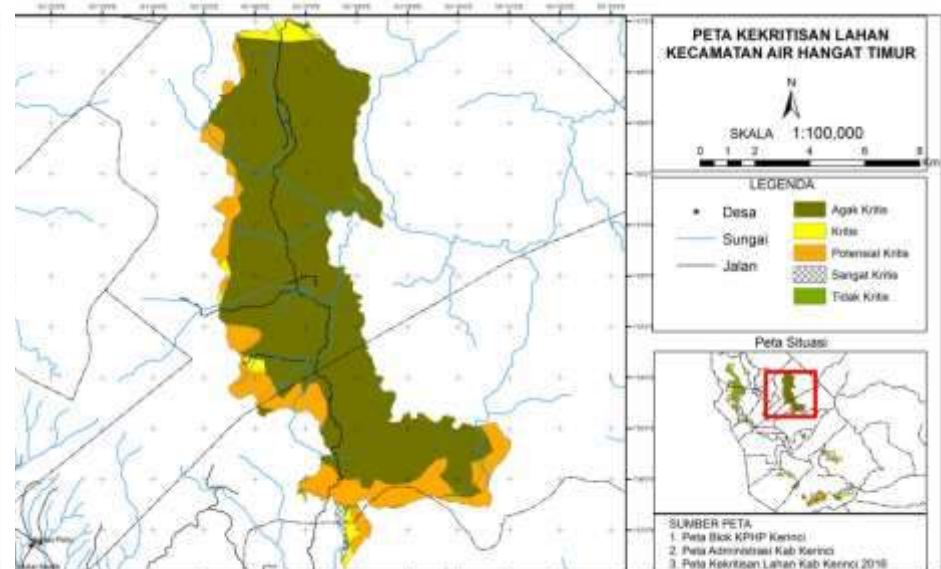
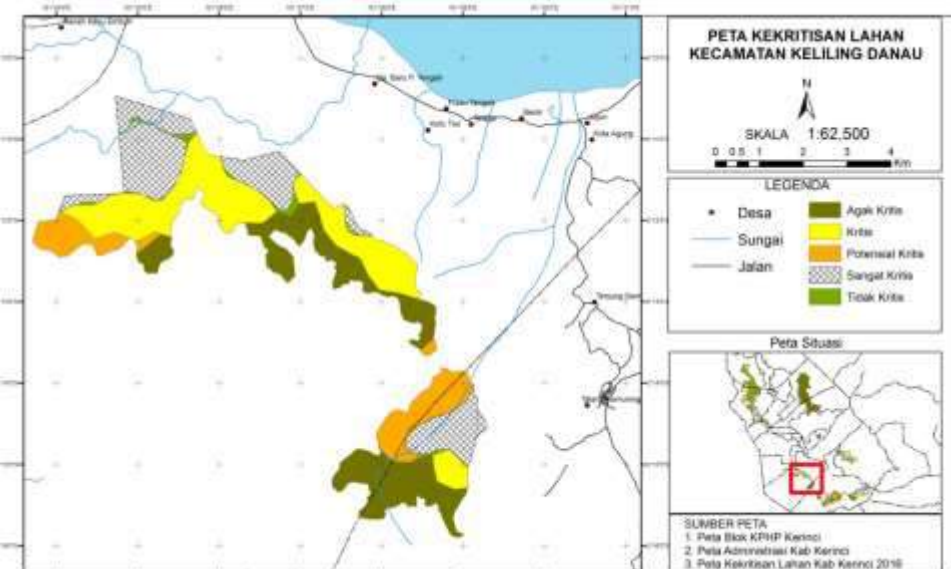
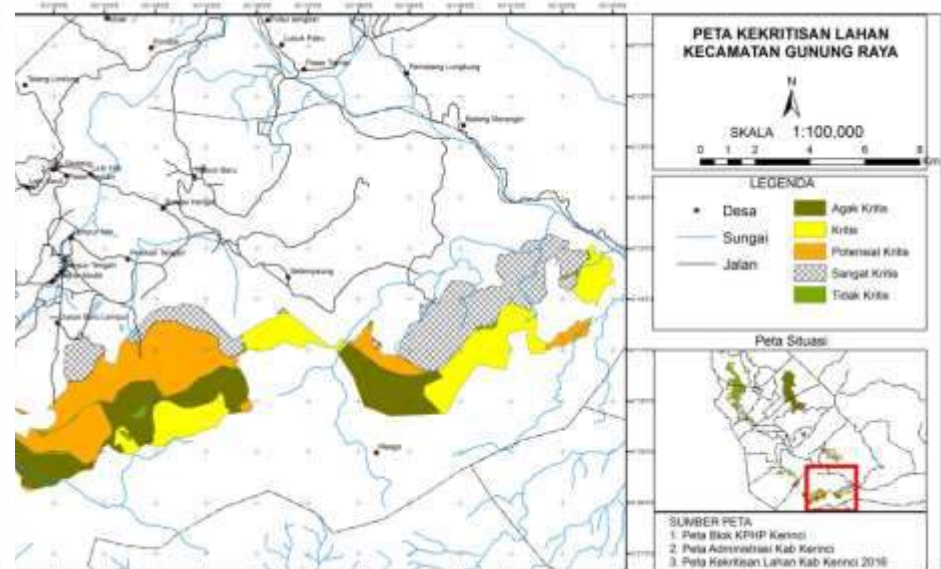
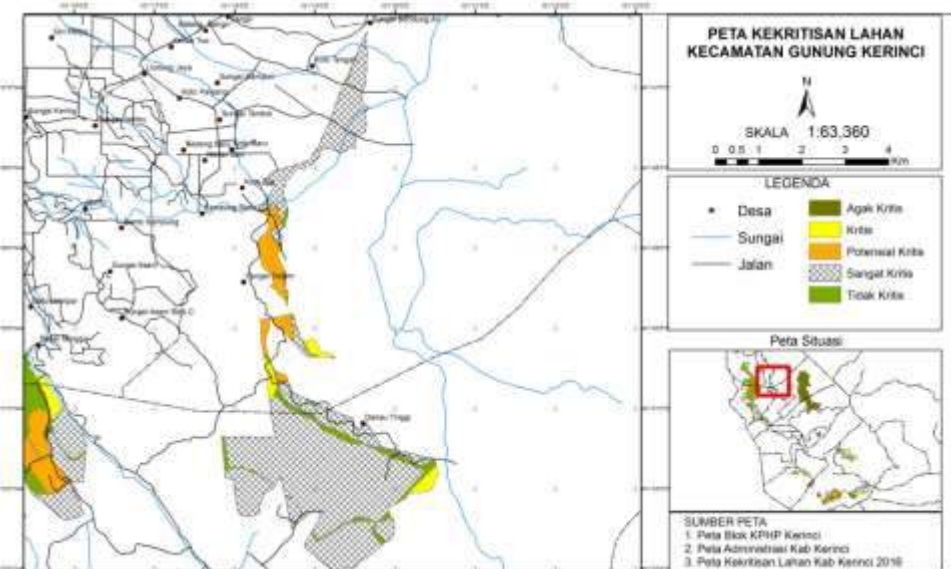


**TUTUPAN HUTAN
MENJADI KRITIS**



Wilayah Kritis KPHP Kerinci

Sumber : Analisis Citra Landsat 2015



Lahan Kritis





Tata Cara Monitoring

Hasil monitoring atas perubahan tutupan hutan dan keberadaan pepohonan di dalamnya menjadi acuan untuk mengukur keberhasilan upaya pencegahan deforestasi dan degradasi hutan

Deforestasi diukur dari luas (hektar) hutan yang terbuka

Degradasi hutan diukur dari jumlah pohon yang ditebang. (Penebangan 50 batang pohon berdiameter > 30 cm setara dengan 1 hektar pembukaan hutan)

Degradasi hutan dan sungai akibat pembukaan lahan untuk penambangan emas liar

Pembayaran imbal jasa ekosistem dilakukan berdasarkan pencapaian target indikator

Pembayaran Penuh (100%)

Kurang dari atau sama dengan 3 Ha

Pembayaran Sebagian (50%)

Lebih dari 3 Ha dan Kurang dari 6 Ha

Tanpa Pembayaran (0%)

Lebih dari atau sama dengan 6 Ha

Indikator
Pembukaan Hutan (Hektar)

KPH-FFI Merangin Project- Masyarakat

PES di Hutan Adat Biang Sari Baru

Pembayaran imbal jasa ekosistem (**PES: payment for ecosystem services**) merupakan pemberian insentif imbalan dana kepada pelaku pengelola hutan atas keberhasilan melaksanakan upaya-upaya perlindungan dan pelestarian hutan. Keberhasilan perlindungan dan pengelolaan hutan dapat diukur dari perubahan tutupan hutan dan keberadaan pepohonan di dalamnya.

Luas Hutan Adat Biang Sari = 180, 63 Ha



TAHAPAN

Penyiapan Wilayah Kelola

Penyiapan Kelembagaan

Penyiapan Program



REDD+ HUTAN ADAT BIANG SARI/ Penghitungan Karbon

Deskripsi Lokasi

Luas Hutan Adat Biang Sari = 180,63 ha

Luas Zona Rehabilitasi (Tanah Adat Biang Sari) = 113,50 hektar

Luas Zona Leakage Pengasi Baru

Hutan adat Biang Sari
ha

= 67,13



LANDASAN HUKUM DAN ATURAN

- Kesepakatan yang telah ditandatangani oleh CFES dan LPHA pada ini mengacu kepada:
- Peraturan perundangan di Indonesia mengenai kehutanan, konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan lingkungan, dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).
- Persyaratan yang ditetapkan Plan Vivo Foundation dalam hal pemberian insentif imbalan dana bagi masyarakat pengelola hutan dan pemantauan manfaat jasa ekosistem hutan.
- Peran dan tanggung jawab LPHA beserta kelompok kegiatan sebagai syarat pembayaran dana imbal jasa ekosistem hutan.

Pelaksanaan Lapangan



Baseline

Kerapatan pohon yang ada di kawasan tanah adat : 26 pohon per hektar

Stok karbon yang ada di kawasan tanah adat : 21,54 ton C/ha



Skenario Proyek

Melakukan penanaman di zona rehabilitasi seluas 113,5 ha dengan target 400 batang per hektar dengan komposisi sebagai berikut.

- Nangka (*Artocarpus heterophyllus*) : 100 pohon per hektar
- Cempedak (*Artocarpus integer*) : 100 pohon per hektar
- Durian (*Durio zibethinus*) : 100 pohon per hektar
- Jengkol (*Pithecellobium jiringa*) : 100 pohon per hektar

Penyerapan karbon yang terjadi adalah sebagai berikut;

- Total penyerapan karbon selama 15 tahun : 63.189,36 ton CO₂e
- Total penyerapan karbon per tahun : 4.212,62 ton CO₂e
- Total penyerapan karbon per hektar per tahun : 37,12 ton CO₂e

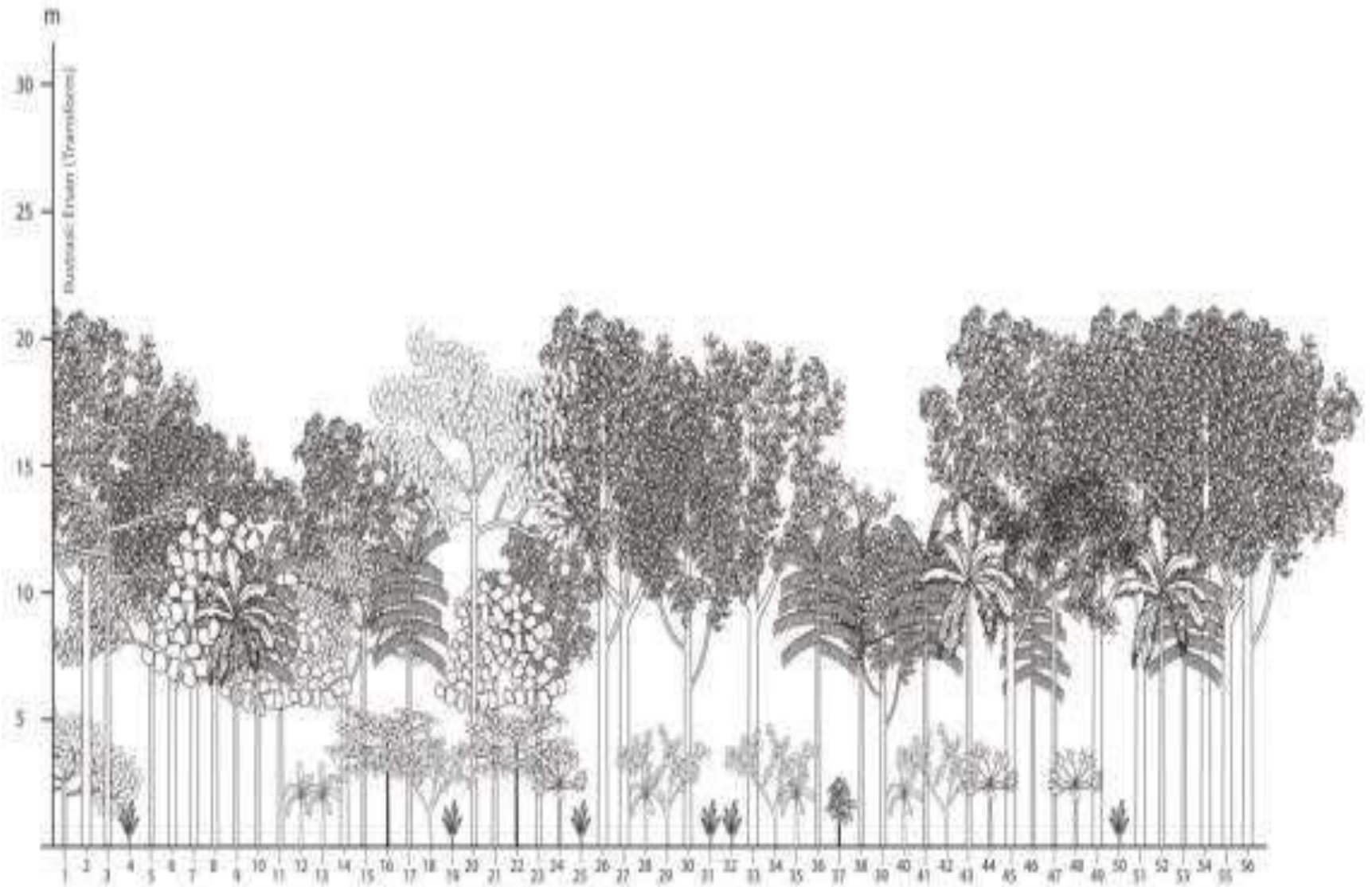
Indikator Pembayaran

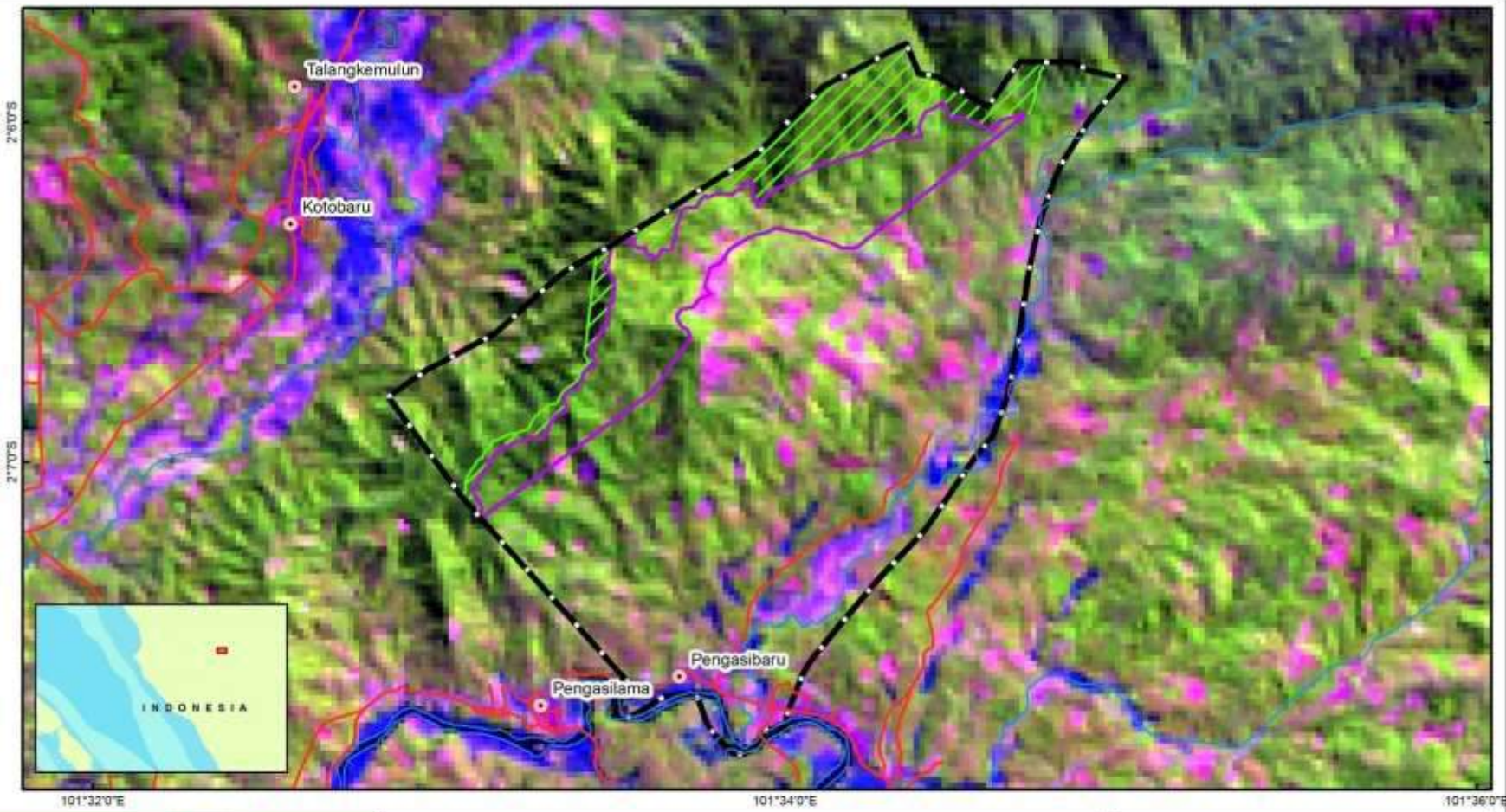
Indikator	Pembayaran %
Kerapatan penanaman lebih dari 400 pohon per hektar	100%
Kerapatan penanaman lebih dari 300 namun kurang dari 400 pohon per hektar	50%
Kerapatan penanaman kurang dari 300 pohon per hektar	0%

Jadwal Nilai Pembayaran

TAHUN	100%	50%	0%
2017	Rp. 100 Juta	Rp. 50 Juta	0
2018	Rp. 100 Juta	Rp. 50 Juta	0
2019	Rp. 100 Juta	Rp. 50 Juta	0

Figure G1-1. Illustration of a complex multi strata agroforest model in HA Biang Sari





Zone Allocation
Pengasi Baru Community Forest

Pengasi Baru, Bukit Kerman Sub District,
Kerinci District, Jambi Province

Skala 1:28,534

Kilometers

Legend

- Village
- Road
- River
- Pengasi Baru Village (755 Ha)
- Rehabilitation Zone (113 Ha)
- Leakage Zone (67 Ha)

Sources / Sumber

1. Base Maps Of Indonesia 1:50,000, BIG- RSI (Rupa Bumi Indonesia) SIG
2. Landsat Imagery 26-July-2016

Proyeksi : Geographic Latitude - Longitude
 Proyeksi : Geographic Latitude - Longitude
 Grid System : Geographic Coordinate System Grid
 Sistem Grid : Grid System Koordinat Geografis
 Datum : WGS 1984
 Datum : WGS 1984

Created by:
 Fazlurrahman S
 Ashraf GIS
 ©2017

KELOMPOK PENERIMA MANFAAT

- Kelompok Perempuan;
- Kelompok Pemuda;
- Kelompok Adat;
- Kelompok Pemdes

EXIT STRATEGY

Mandiri

- Agroforestry
- Produk

Sertifikasi

- Sertifikasi Karbon Plan Vivo



KEGIATAN LAIN:

1. Kebun Bibit Tanaman Unggulan Lokal, MPTS



2. Rehabilitasi lahan Kritis

- Pola Agroforestri
- Tanaman MPTS dan Kayu-kayuan (bibit unggulan/okulasi)
- Insentif (tergantung jumlah pertumbuhan tanaman)



Areal

HP

=

APL

Jenis Komoditi

Kayu

=

MPTS



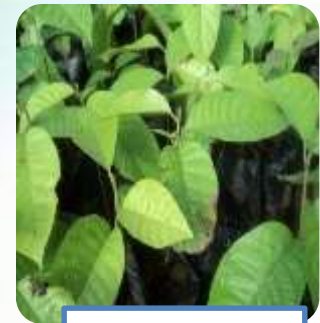
Kayu Pacat



Surian



Kayu Manis



Sembulun



3. Pemberdayaan Kelompok Perempuan



4. Perhutanan Sosial





TERIMAKASIH